

FRANZ MAGNIS-SUSENO

SEKITAR BUDAYA KEKERASAN

PENGANTAR

Orang cenderung bertindak dengan kekerasan menjadi masalah untuk psikologi. Ia tidak mampu membawa diri secara normal, mengelola konflik-konfliknya secara biasa. Ia sakit, sakit jiwa, sakit hati. Apabila dalam sebuah masyarakat tindakan kekerasan bertambah, masyarakat itu sakit.

Orang menjadi sakit demikian apabila tidak lagi mampu menangani tekanan-tekanan. Terlalu banyak frustrasi. Hati terus marah, misalnya karena merasa terus-menerus diperlakukan dengan tidak adil, sekaligus tidak berdaya. Atau karena menyaksikan ketidakadilan mencolok tanpa dapat berbuat apa-apa.

"Budaya kekerasan" sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap gesekan atau konflik dapat berakhir dengan pembunuhan atau perkelahian masal. Di mana-mana ada tawuran, juga antara orang-orang biasa di de-

sa-desa. Kalau yang terlibat orang dari suku atau agama berbeda, bisa terjadi perang suku atau perang agama.

Untuk ke luar dari kemelut itu, kita harus bertanya dulu apa latar belakang suasana yang membuat orang harus mengekspresikan kemarahan dan keputusasaannya dengan kekerasan.

I. LATAR BELAKANG BUDAYA KEKERASAN

1. TRANSFORMASI MENDALAM MASYARAKAT

Perlu kita perhatian bahwa modernisasi dan globalisasi sendiri merupakan tekanan luar biasa atas masyarakat kita yang membuatnya berada dalam keadaan tegang terus-menerus. Proses transformasi budaya mendalam dari masyarakat tradisional ke yang pasca-tradisional dengan sendirinya menciptakan disorientasi/dislokasi/disfungsionalisasi yang terasa sebagai ancaman ekonomis, psikologis dan politis. Cara-cara pengelolaan konflik tradisional tidak lagi memadai. Begitu pula cara-cara tradisional untuk menghadapi pluralisme-pluralisme dalam masyarakat tidak lagi bekerja. Dengan sendirinya kecenderungan primordialistik ke dalam dan agresif/keras ke luar bertambah selama masyarakat tidak mengalami proses modernisasi sebagai proses yang positif, yang meningkatkan rasa sejahtera dan keadilan.

2. AKUMULASI KEBENCIAN DALAM MASYARAKAT

Namun tekanan umum ini tidak menjelaskan mengapa baru dalam tahun-tahun terakhir kekerasan sedemikian merajalela. Yang sering ditunjuk adalah segala macam provokasi. Tetapi mengapa orang begitu mudah terprovokasi. Kiranya tidak dapat disangkal juga bahwa ada tendensi-tendensi eksklusif, baik di kalangan agama, maupun di kalangan suku yang mempunyai efek. Mengkafirkan yang beragama lain dan mengajar anak agar mengambil jarak dari anak lain yang "kafir", segala macam ceritera tentang golongan atau kelompok lain tanpa usaha untuk menjamin kebenarannya, pemanasan hubungan antar golongan, merupakan kenyataan yang sulit disangkal.

Namun gejala negatif itu sendiri juga memerlukan penjelasan: Mengapa ada emosi-emosi negatif begitu kuat?

3. ORDE BARU SEBAGAI SISTEM INSTITUSIONALISASI KEKERASAN

Semua hal ini kiranya tidak lepas dari sistem Orde Baru. Dapat dikatakan bahwa Orde Baru merupakan sistem institusionalisasi kekerasan. Sistem kekuasaannya berdasarkan kekuasaan tak tertanding Angkatan Bersenjata yang mempertahankan diri karena kemampuannya untuk **membujuk** (koop-tasi) dan **mengancam** (intimidasi). Semua konflik sosial/kepentingan dipecahkan tidak secara rasional/ objektif/dialo-

gal/adil melainkan secara kekuasaan: kooptasi, intimidasi, ancaman, penindasan. Hanya dengan memakai jalur itu orang/kelompok-orang dapat mempertahankan diri/maju selama Orde Baru. Kebrutalan Angkatan Bersenjata di mana pun mereka beraksi, dibarengi mereka mengkhawatirkan masyarakat tentang nilai-nilai luhur ("Pancasila", "rasa kebangsaan", "kesatuan dan persatuan" dll.) menambahkan sinisme dan rasa putus asa masyarakat.

4. MASYARAKAT YANG SAKIT

Mari kita lihat kenyataan ini dengan lebih terinci. Kita bertolak dari kenyataan bahwa masyarakat begitu mudah dapat diprovokasi. Perhatian kita tertarik ke Maluku dan Kalimantan Barat hal mana mudah dimengerti. Tetapi di Jakarta pun ada kampung-kampung yang saling membunuh dan membakar rumah. Di Jawa ada dusun-dusun yang saling berperang. Setiap pertandingan sepak bola mengandung risiko letusan kekerasan. Masyarakat kita sedang sakit. Gesekan kecil saja dapat dengan cepat memicu tindak kekerasan, dan, itulah yang paling mengkhawatirkan, semakin cepat melibatkan komunitas-komunitas yang bersangkutan secara kolektif. Apabila lalu kampung-kampung yang kebetulan terlibat berbeda suku atau agamanya, bisa terjadi perang antar suku atau agama, antara penduduk asli dan pendatang. Masyarakat diliputi budaya

kekerasan di mana konflik-konflik sehari-hari tidak lagi mampu ditangani dengan baik, melainkan langsung merangsang kekerasan serta melibatkan komunitas yang bersangkutan. Terang saja bahwa keadaan itu mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak gelap tadi.

Bangsa Indonesia secara hakiki plural: Ratusan suku, etnik dan budaya yang menganut beberapa agama, tersebar atas ribuan pulau, terdiri atas, dengan mobilitas tinggi di mana ada yang merantau sendiri dan ada yang mengikuti pelbagai program pemerintah. Bangsa seperti itu hanya dapat bersatu apabila memiliki kemampuan psikis untuk bertoleransi, artinya untuk menerima tanpa stress keanekaan tradisi, gaya hidup dan bergaul, pandangan hidup dan kebiasaan religius.

Tetapi sekarang seakan-akan semua titik sambung pluralitas tadi mulai retak. Seakan-akan masyarakat terkena atrofi kemampuan untuk bersolidaritas melebihi lingkungan primordial, suatu penyempitan fokus perhatian pada kelompok sendiri di mana kemampuan untuk merasakan kebersamaan "kita sebangsa" atau "kita sewilayah" digero-goti oleh perspektif "mereka" dan "kami", di mana "kami" semakin sempit dan "mereka" yang lain dirasakan sebagai ancaman.

Mengapa masyarakat bisa sampai begitu? Pluralitas bangsa Indonesia merupakan kenyataan yang sudah lama. Dulu pun kadang-kadang ada ketegangan. Tetapi merebaknya konflik komunal seperti sekarang baru mulai beberapa tahun lalu. Maka dasarnya tak mungkin ditemukan dalam watak orang-orang kita, dalam ajaran agama, atau dalam tradisi-tradisi suku-suku. Faktor yang menentukan harus dicari dalam pengalaman rakyat Indonesia selama puluhan tahun terakhir.

Kebijakan dasar pemerintahan Orde Baru adalah **depolitisasi**. Sebagai reaksi atas ideologisasi masyarakat di masa Demokrasi Terpimpin, masyarakat dikeringkan secara politis. Partai-partai politik dikebiri, kegiatan politik, bahkan pertemuan lebih dari lima orang dilarang. Pembangunan, dan itu berarti: nasib rakyat, diurus dari atas. Melalui UU pemerintahan daerah struktur-struktur kepemimpinan lokal -yang sekaligus struktur-struktur kemandirian- dihancurkan (hancurnya wibawa kepemimpinan tradisional itulah yang begitu mempersulit penyelesaian konflik antara suku atau umat beragama). Kepala desa pun menjadi wakil pemerintah pusat yang membantu dalam eksploitasi rakyatnya.

Dengan tertutupnya dimensi politik perhatian masyarakat terfokus pada unsur-unsur primordial. Apa pun yang ditetapkan "pemerintah" harus diterima oleh rakyat. Sekaligus rakyat

menyaksikan pembangunan mentereng yang bukan milik mereka. Yang maju selalu "orang lain". Pada saat yang sama rakyat semakin sering merasa menjadi kurban pembangunan. Gedung Ombo hanyalah simbol bagi ratusan kejadian serupa. Rakyat harus melepaskan rumahnya, tanahnya, hutannya, dengan ganti rugi yang sudah tidak memadai sama sekali masih dikorupsi. Dan apabila rakyat berani menolak, mereka dituduh "PKI" atau "ekstrem kanan". Ancaman dan intimidasi menjadi bahwa penyelesaian konflik di bawah Orde Baru.

Maka yang terjadi adalah akumulasi rasa kecewa, marah, perasaan perlakuan tidak adil, kebencian, dendam. Emosi-emosi itu dengan sendirinya terarah kepada "yang lain", "mereka". "Mereka", itu bisa Pemerintah, birokrasi, ABRI, tentu masyarakat Tionghoa, tetapi juga suku lain, pendatang atau penduduk aseli, umat beragama lain dst. Pada waktu Orde Baru terus-menerus mengomongkan persatuan dan kesatuan, persatuan masyarakat semakin keropos. Gelombang kekerasan individual dan kolektif, eksplosi sukuisme, fanatisme agama, daerahisme, bahkan kampungisme adalah akibat penindasan terus-menerus itu.

II. JALAN KE LUAR?

Usaha ke luar dari kemelut mesti dijalankan di semua level yang terkena. Misalnya saja, hasutan antar agama, pence-

riteraan horror stories, generalisasi kejadian-kejadian terisolasi perlu berhenti. Perubahan sikap dalam panutan masyarakat, khususnya agama, di sini diperlukan.

Daripada membuat anak eksklusif, perlu pendidikan yang inklusif, yang mengajak bersikap positif terhadap anak yang lain suku, lain agama, lain daerah, lain pembawaannya. Harus ditegaskan bahwa mereka manusia seperti "kita", orang Indonesia seperti "kita", orang yang meski beragama lain juga diciptakan dan cintai oleh Tuhan. Perlu kontak antara umat beragama dan tokoh serta panutan masyarakat perlu diintensifikasi. Proses penyembuhan luka hati rakyat tidak mungkin cepat-cepat. Maka semua pihak harus bekerja sama. Para panutan nasional dan lokal tak boleh membiarkan diri terseret oleh emosi sukuisme dan agama.

Namun usaha di tingkat masyarakat langsung hanya akan efektif, apabila diciptakan kondisi-kondisi struktural yang menunjang. Aparat harus mengembalikan kekuasaan hukum dan membongkar provokasi yang mau memanfaatkan keadaan itu. Pelanggaran hak asasi manusia harus ditindak dengan tegas.

Tetapi terutama kita harus berhasil mewujudkan suatu masyarakat yang terbuka, yang sungguh-sungguh demokratis.

Orang harus dapat dengan bebas mengajukan harapan dan kritiknya, ia tidak lagi sekadar objek rencana penguasa. Kita harus belajar untuk menghadapi konflik-konflik di antara kita dengan terbuka, rasional, dialogal. **Demokrasi** adalah bentuk kenegaraan yang paling memungkinkan pengelolaan konflik secara wajar. **Desentralisasi** dan **otonomi daerah** akan sangat penting dalam pengembalian keterbukaan sosial masyarakat.

Syarat yang paling dasar yang harus diwujudkan adalah **keadilan**, dan pembangunan yang beradab. Adalah pengalaman **ketidakadilan** yang meracuni hati orang. ■

